

Judul : Setelah jadi tersangka, Novanto tampak anteng
Tanggal : Minggu, 23 Juli 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1 dan 9

SETELAH JADI TERSANGKA

Novanto Tampak Anteng

BIASANYA, orang yang telah diterangkan KPK kelihatan panik, buru-buru lakukan praperadilan sebagai upaya lepas dari jeratan KPK. Tapi lain bagi Setya Novanto. Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar ini anteng-anteng saja. Dia tak tergesa-gesa mau ajukan praperadilan. Dia tetap melaksanakan tugas-tugas kesehariannya.

Kemarin, misalnya, dia menjadi penguji non akademis calon doktor

hukum di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya. Tak nampak di wajahnya ada kegundahan. Dia kalem. Novanto hadir di sana sebagai penguji non akademis calon doktor hukum dalam sidang ujian terbuka Desertasi Anggota DPR dari Partai Golkar Adies Kadir. Adies mengambil jenjang S3 Bidang Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Sidang ujian terbuka De-

sertasi ini digelar di Gedung Graha Wiyata lantai 9 Untag.

Saat menguji Adies, Novanto bicara soal periodisasi hakim dengan mencontohkan sosok hakim di Amerika Serikat yang bertugas hingga berumur 70 tahun. "Kalau itu dipotong menjadi 65 tahun, itu (jadi) masalah, (hakim) tingkat pertama dan banding akan

♦ BERSAMBUNG KE HAL 9

Novanto Tampak Anteng

... DARI HALAMAN 1

hilang 50 persen. Sedangkan kebutuhan hakim sekarang ada 4 ribu. Sekarang yang disetujui oleh pemerintah ada 1.684 calon hakim. Tentu ini menjadi hati-hati dalam periodisasi," tutur Novanto.

Kepada Adies, Novanto bertanya mengenai evaluasi periodisasi jabatan hakim. Menurutnya, perekrutan hakim untuk mengisi 86 peradilan harus segera dilaksanakan. "Karena setelah perekrutan, akan bisa dipakai sekitar 2,5 tahun lagi," ujarnya.

Selain Novanto, yang menguji Adies adalah Wakapolri Komjen Syafruddin dan anggota Komisi III DPR Junimart Girsang. Sementara Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menjadi salah satu dari 10 penguji akademis Adies. Sidang ini juga dihadiri Wakil Ketua MPR Mahyudin, Wakil Ketua MA M Syarifuddin dan Sekjen Golkar Idrus Marham.

Adies menyebut, Novanto menjadi penguji karena sebagai ketua DPR, dialah yang mengawal terdapat RUU Jabatan Hakim. Dengan RUU itu nantinya jabatan hakim cepat diproses. "Memang sebagai ketua DPR utamanya kita undang, karena ini ditunggu di seluruh Indonesia," ujar Adies.

Usai menguji Adies, Novanto mau meladeni pertanyaan-pertanyaan wartawan dengan tenang. Termasuk, saat ditanya soal rencana mengajukan praperadilan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. "Saya sama sekali belum berpikir sampai ke praperadilan dan langkah hukum lainnya," jawab Novanto. Dia mengaku masih fokus pada tugas-tugasnya sebagai ketua DPR dan ketua Partai Golkar.

Sebelumnya, Dewan Pakar Partai Golkar mendesak Novanto mengajukan praperadilan atas status hukumnya. Mereka juga meminta DPP memberikan advokasi hukum kepada ketua umumnya dalam kasus tersebut.

Sekjen Golkar Idrus Marham menyatakan, partainya berharap KPK berpegang pada fakta hukum. Untuk diketahui, dalam putusan hakim dalam persidangan kasus dugaan korupsi pro-

yek e-KTP, nama Novanto "hilang". "Kita tetap hormati proses hukum. Tapi, harapannya KPK berpegang pada fakta hukum," ujar Idrus.

Menurut Idrus, sejak Novanto belum ditetapkan sebagai tersangka, Golkar menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Dia yakin komisi antirasuah akan mengedepankan keadilan hukum.

Sementara, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar se-Indonesia menyatakan mendukung semua kebijakan yang diputuskan DPP Partai Golkar, termasuk mempertahankan Novanto sebagai ketua umum meski berstatus tersangka. "Kami mendukung seluruh poin yang ditetapkan DPP, karena sejalan dengan apa yang kami rapatkan tadi malam," ujar Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae di Hotel Sultan, kemarin.

Ridwan bilang, Jumat malam, ketua DPD Partai Golkar dari 32 provinsi menghadiri pertemuan dengan DPP yang juga dihadiri Novanto dan Ketua Harian Nurdin Halid. Agenda pertemuan untuk merespons dinamika politik terkait penetapan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. "Kami minta dipertemukan langsung dengan Setya Novanto. Kami dengarkan secara seksama apa yang terjadi sesungguhnya," imbuh Ridwan.

Dari pertemuan itu, DPD Golkar menyepakati tiga hal. Pertama, DPD tidak mengadakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) memilih pemimpin baru. Kedua, DPD akan mensosialisasikan keputusan DPP kepada semua jajaran pengurus Partai Golkar di tingkat bawah. Ketiga, mengimbau kepada DPP untuk segera membuat strategi pembelaan hukum bagi Novanto.

Menurut Ridwan, kepemimpinan Novanto dan Idrus Marham sudah terbukti keberhasilannya untuk internal Partai Golkar. Di bawah kepemimpinan Novanto, Golkar berhasil mendapatkan suara di atas 58 persen dalam pemilihan kepala daerah. "Masalah hukum adalah perjalanan pribadi dia (Novanto). Kami ingin mempertahankan soliditas," ujar Ridwan. ■ OKT